

**PERAN DAN PROSES LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Oleh:

PAULUS P NAIBAHO
1740050161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulus P Naibaho

Nim 1740050161

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya tulis tugas akhir ber judul “ PERAN DAN PROSES LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SAMOSIR” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku- buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasi atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugasakhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Februari 2022



(Paulus P Naibaho)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERAN DAN PROSES LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SAMOSIR**

Oleh:

Nama : Paulus P Naibaho
Nim : 17 400 501 61
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertanyakan dan sidang tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)
03211125804

Pembimbing II

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)
0324095802

Ketua Program Studi

(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 12 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana satu pada program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Paulus P Naibaho
NPM : 17 400 501 61
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PERAN DAN PROSES LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SAMOSIR” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.	,Sebagai Ketua	
2. Radisman Saragih, S.H., M.H.	,Sebagai Anggota	
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	,Sebagai Anggota	

Jakarta, 12 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulus P Naibaho
NIM : 17 400 501 61
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/ kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta 12 Februari



(Paulus P Naibaho)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat dan rahmatnya penulis diberikan berkat, kekuatan, kasih dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir**”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena terbatas kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Namun banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Edward Naibaho dan Nenni Pandiangan dan juga kakak saya Marli Naibaho, Meriana Naibaho, Rita Naibaho, Mastauli Naibaho, Delima Naibaho dan juga abang saya Leo Naibaho, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasehat, serta atas doa yang luar biasa dalam setiap langkah penulis.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. dan Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan akademis dan dukungan yang benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh teman-teman penulis di FH UKI angkatan 17 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
7. Terkasih yang selalu meluangkan waktunya membantu dalam pengetikan skripsi, Novita Bentin Saputri Sidauruk.
8. Teman-Teman seperjuangan diluar Kampus yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu (Par Samosir).
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 12 Februari 2022

Penulis



Paulus Pandapotan Naibaho

DAFTAR ISI

Visi Misi.....	II
Halaman Lembar Persetujuan.....	III
Halaman Lembar Pengesahan	IV
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	V
Halaman Publikasi Tugas Akhir	VI
Kata Pengantar	VII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Tahap Penelitian.....	12
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.8 Lokasi Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Penulisan	16
BAB II	17
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
2.1 Teori Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	17
2.1.1.1 Penegakan Hukum Objektif	21
2.1.1.2 Aparatur Penegak Hukum.....	22
2.1.2 Tindak Pidana	27

2.1.2.1 Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.1.2.2 Barang Bukti dan Kegunaannya.....	31
2.1.3 Tindak Pidana Korupsi.....	32
2.1.4 Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	44
2.1.5 Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	45
2.1.5.1 Bentuk-bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi	50
2.2 Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	58
BAB III.....	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SAMOSIR	73
3.1 Tugas dan Wewenang Lembaga Kejaksaan.....	76
3.1.1 Bidang Pidana	76
3.1.2 Bidang Perdata	76
3.1.3 Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum.....	77
3.2 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.....	81
3.3 Upaya Penanggulangan Korupsi Menurut Para Ahli	83
BAB IV	88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN SAMOSIR	88
4.1 Penyelidikan.....	88
4.2 Penyidikan.....	90
4.3 Tahap Penuntutan.....	102
4.4 Upaya yang Dilakukan Jaksa Dalam Menghadapi Kendala Pada Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	104
BAB V	115
PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

- A. Nama : Paulus Pandapotan Naibaho
B. NIM : 1740050161
C. Judul : Peran dan Proses Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir
D. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
2. Radisman Saragih, S.H., M.H.
E. Program Kekhususan : Hukum Pidana
F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Undang-Undang, dan Internet
G. Jumlah Halaman : X+120 Halaman
H. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Peran Jaksa
I. Ringkasan Isi

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan masyarakat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga penuntut umum.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis, yaitu mengumpulkan data lapangan untuk dianalisis dengan aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah bahwa lembaga kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Samosir, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindakan pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan yang seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan keputusan dengan pidana penjara yang tinggi disertai hukuman pidana denda, perampasan harta benda dan dijatuhkan hukuman uang pengganti

Jakarta, 12 Februari 2022

Penulis



Paulus Pandapotan Naibaho

- A. Name : Paulus Pandapotan Naibaho
B. NIM : 1740050161
C. Title : Role and Process of the Prosecutor's Office
in Handling Corruption Cases in Samosir
Regency
D. Supervisor : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
2. Radisman Saragih, S.H., M.H.
E. Specialization Program : Criminal Law
F. Reading List : Books, Journals, Laws, and Internet
G. Number of Page : X+120 Pages
H. Keywords : Corruption, the Role of the Prosecutor
I. Summary of Content

ABSTRACT

The crime of corruption in Indonesia has developed which continues to increase from year to year. Corruption has become an extraordinary crime. Corruption can pose a danger to human life because it has penetrated into the world of education, health, provision of public food and clothing, religion, and other social service functions. The state apparatus authorized to examine criminal cases are the police, prosecutors and courts. In handling corruption crimes, the prosecutor acts as an investigator and also a public prosecutor.

This research is an empirical sociological research, which collects field data to be analyzed with applicable law.

The results of this study are that the prosecutor's office plays a role in handling corruption in Samosir Regency, this can be proven by the data obtained, namely every criminal act of corruption is always investigated thoroughly. Prosecutors in prosecuting criminal acts of corruption with the most severe demands and the court in giving decisions with high prison terms accompanied by criminal penalties for fines, confiscation of property and sentenced to substitute money

Jakarta, 12 February 2022

Author



Paulus Pandapotan Naibaho